



JURNAL MUDABBIR Vol. 1 No. 1. 2021

MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Email : journalmudabbir@gmail.com

SEJARAH PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) DI INDONESIA

**Toni Nasution¹, Abdul Rahman Siregar², En Riskinta Tumanggor³,
Muhammad Heriadi⁴, Raudhatul Jannah⁵**

^{1,2,3,4,5,6} UIN Sumatera Utara Medan

Email: ¹ toninasution@uinsu.ac.id, ² abdulrohmansiregar@gmail.com,
³ enriskintatumangger@gmail.com, ⁴ muhammadheriadi08@gmail.com,
⁵ raudhatuljnnh1603@gmail.com

ABSTRAK

Dari zaman sebelum merdeka hingga sekarang kita sudah mengenal tentang istilah pendidikan, namun pendidikan di negara Indonesia pada zaman dahulu sangatlah buruk. Tidak semua rakyat Indonesia bisa menempuh jenjang pendidikan yang layak. Padahal pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting bagi individu untuk membentuk karakter suatu bangsa. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di zaman modern ini wajib bersyukur karena semuanya sudah mengalami banyak perubahan. Beberapa catatan tentang sejarah, pendidikan di Indonesia mulai dari pendidikan pada masa penjajahan, orde baru, hingga reformasi. Setiap masa pendidikan memiliki kesamaan tujuan, tetapi dengan sistem penerapan yang berbeda-beda. Dalam artikel ini, penulis membahas tentang bagaimana sejarah pendidikan dari masa ke masa yang mampu membentuk karakter suatu bangsa Indonesia yang hidup di zaman modern ini. Kita harus mampu memetik setiap pelajaran dan makna yang terkandung dari diciptakannya pendidikan di masa lalu.

Kata Kunci: *Sejarah Pendidikan Luar Sekolah.*

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia tersedia dalam 3 jalur, setiap jalur disediakan dengan tujuan untuk mempermudah bagi peserta didik dalam memilih jalur pendidikan yang paling sesuai dengan keadaan peserta didik tersebut. Jalur pendidikan yang ada di Indonesia, pertama adalah jalur pendidikan Formal, lalu yang kedua adalah jalur pendidikan Informal, dan yang ketiga adalah jalur pendidikan Nonformal. Jenjang yang pada pendidikan nonformal adalah kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Kejar paket A adalah pendidikan yang setara dengan pendidikan sekolah dasar di jenjang pendidikan formal, lalu kejar paket B adalah pendidikan yang setara dengan pendidikan sekolah menengah pertama di jenjang pendidikan formal, lalu kejar paket C adalah pendidikan yang setara dengan sekolah menengah atas di jenjang pendidikan formal. Pada jalur pendidikan nonformal, tidak hanya terdapat program jenjang pendidikan itu saja, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 26 yaitu pendidikan nonformal itu meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

Adapun satuan pendidikan nonformal adalah lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Jalur pendidikan ketiga adalah pendidikan informal, dimana jalur pendidikan ini dilakukan sendiri oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

METODE PENELITIAN

Metode atau langkah-langkah dalam pembuatan artikel ini adalah dengan menggunakan studi pustaka/studi literatur. Topik dalam pembuatan artikel ini sudah ditentukan oleh bapak dosen dengan mata kuliah "Pendidikan Luar Sekolah", sedangkan sistem berikutnya dimulai dari pembuatan judul, abstrak, inti pendahuluan, hingga sampai pembahasa dengan menggunakan literaturbaca dimulai dari buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, dan sumber bacaan lainnya. Metode studi pustaka ini dilakukan dengan mempelajari dan membaca beberapa literatur-literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan yang menjadi objek pembahasan di dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pendidikan di Nusantara pada Masa Pra Kolonialisme

Pendidikan di Indonesia pada Masa Hindu-Buddha, Pada abad ke-6, berkembanglah di Sumatera sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Sriwijaya yang kemudian menjadi pusat agama Buddha. Raja-raja Sriwijaya wangsa Syailendra dan beragama Buddha. Empat buah batu bertulis ditemukan di Palembang, Jambi, dan Bangka. Semuanya ditulis dalam huruf Pallawa di dalam bahasa Melayu tua bercampur perkataan-perkataan Sanskerta.

Kerajaan Sriwijaya menjadi kuat dan jaya karena perdagangannya dengan daerah-daerah di seberang lautan. Untuk perdagangan tersebut, diperlukan kapal-kapal dan pegawai-pegawai yang dapat menjalankan kapal. Maka dari itu, diperlukan pendidikan untuk pegawai-pegawai tersebut. Perdagangan meminta pendidikan yang praktis dan langsung dapat dipakai di dalam perniagaan. Saudagar-saudagar pada waktu itu termasuk golongan bangsawan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga berdagang dengan negeri asing itu, lalu muncullah Dubu sebagai kota tempat berguru ilmu yang praktis untuk berdagang. Lambat laun Sriwijaya menjadi pusat ilmu pengetahuan.

Sriwijaya merupakan pusat ilmu pengetahuan tempat para sarjana dan teolog Buddha sangat dihormati dan dihargai. Oleh sebab itu, para musafir dan ulama senang mendalami ilmu pengetahuan di Sriwijaya, baik bersumber dari agama Buddha Mahayana maupun agama Buddha Hinayana. Salah seorang dari tujuh orang guru agama Buddha yang paling terkenal pada zaman I-Tsing ialah Shakyakirti yang tinggal di Sriwijaya. Ia adalah pengarang Hastadandhashastra, yang kemudian disalin I-Tsing ke bahasa Tiongkok.

Kerajaan Majapahit sempat menjadi negara besar. Seluruh daerah Nusantara yang menjadi wilayahnya mengalami kemajuan di hampir semua bidang, yaitu bidang pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan sangat diperhatikan. Sampai jatuhnya kerajaan Hindu terakhir yaitu kerajaan Majapahit itu sendiri, pada akhirnya abad ke-15 ilmu pengetahuan berkembang terus, khususnya di bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan, tata negara, dan hukum.

Pada abad-abad terakhir menjelang jatuhnya kerajaan Hindu di Indonesia, sistem pendidikan tidak dijalankan lagi secara besar-besaran, tetapi dilakukan oleh ulama guru kepada siswa dalam jumlah terbatas di padepokan. Di padepokan tersebut siswa selain diajarkan ilmu pengetahuan yang bersifat umum, juga diajarkan pula ilmu-ilmu bersifat spiritual religius.

Terdapat beberapa ciri pendidikan pada periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, antara lain:

- a. Bersifat informal, karena proses belajar-mengajar tidak melalui institusi yang formal.
- b. Berpusat pada religi, yaitu ajaran agama Hindu dan Buddha.
- c. Aristokratis dimana pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu para raja dan bangsawan. Kaum bangsawan biasanya

Mengundang guru untuk mengajar anak-anaknya di istana atau anak-anaknya pergi belajar ke guru-guru tertentu.

d. Pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana untuk agama Hindu dan kaum Biksu untuk agama Buddha.

2. Pendidikan di Indonesia pada Zaman Penyebaran Islam

Pada permulaan abad ke-16 dan mungkin di dalam abad ke-13 banyak masyarakat yang dahulu memeluk agama Hindu kemudian memeluk agama Islam. Mungkin sekali agama Islam mereka telah disesuaikan dengan keadaan dan adat-istiadat dan mungkin dengan kebudayaann bangsa Hindu. Proses penyebaran Islam dilakukan dengan berbagai jalan dimulai dari perdagangan, pernikahan, pengobatan, budaya, maupun pendidikan.

Lembaga pendidikan Islam telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zamannya. Adapun lembaga pendidikan di Indonesia pada zaman penyebaran Islam antara lain: a) Pendidikan Masjid, Langgar, dan Surau, Pengajaran-pengajaran di langgar-langgar merupakan pengajaran permulaan. Apa yang diajarkan di langgar merupakan pelajaran agama dasar, dimulai dari pelajaran dalam huruf Arab. Tujuan pendidikan dan pengajaran di langgar adalah murid dapat membaca dan lebih tepat melahukan menurut irama tertentu seluruh isi dari kitab Al-Quran, b) Pendidikan Pesantren, Keberadaan pesantren, khususnya di Jawa tidak bisa dilepaskan dari peranan Walisongo. Dakwah Walisongo berhasil mengislamkan Jawa karena metodenya mengombinasikan aspek spiritual, Islam, dan mengakomodasikan tradisi masyarakat setempat. Mereka mendirikan pesantren sebagai tempat dakwah Islam sekaligus sebagai proses belajar-mengajar. Pesantren mengambil alih pola pendidikan padepokan tapi mengubah bahan dan materi yang diajarkan dan melakukan perubahan secara perlahan-lahan tata nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. c) Pendidikan Madrasah, Kemunculan madrasah erat hubungannya dengan sosok seorang menteri dari dunia Arab bernama Nizam el-Mulk pada abad ke-11 sebagai pendiri lembaga pendidikan madrasah. Tokoh ini mengadakan pembaharuan dengan memperkenalkan sistem pendidikan yang bermula bersifat murni teologi (Ilmu Ketuhanan) dan menambah ilmu-ilmu yang bersifat keduniawian, seperti astronomi dan ilmu obat-obatan.

Pendidikan di Nusantara pada Masa Kolonialisme

Pendidikan pada Masa Penjajahan Portugis, Pada permulaan abad ke-16, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia, kemudian tidak begitu lama disusul oleh bangsa Spanyol. Tujuan utama mendatangi Indonesia adalah (berdagang) rempah-rempah yang banyak dihasilkan oleh Maluku. Perdagangan mereka makin maju dan makin banyak bangsa Portugis dan Spanyol berdatangan ke Maluku. Di samping berdagang, tujuan mereka adalah untuk menyebarkan agama Katolik. Untuk tugas-tugas ini, didatangkan para misionaris seperti Fransiskus Xaverius, yang telah menyelesaikan studinya di

Sarekat Yesus, kemudian diberi tugas ke daerah-daerah timur Asia. Maka ini juga tujuan beliau datang ke Maluku. Beliaulah yang dianggap sebagai peletak dasar agama Katolik di Indonesia.

Untuk menyebarkan agama Katolik itu, para misionaris mendirikan sekolah. Pada tahun 1536, di Ternate didirikan sekolah yang mendidik calon-calon misionaris/pekerja agama. Sekolah seminari ini juga didirikan di pulau Solor. Banyak anak-anak Indonesia yang masuk di sekolah ini. Dengan adanya usaha-usaha sosial dari para misionaris, kehidupan orang-orang Maluku makin menjadi maju.

Pendidikan pada Masa Penjajahan Belanda, Penajajahan Belanda dalam perjalanan sejarahnya menunjukkan bagaimana ia menerapkan kebijakan pendidikan yang diskriminatif dan menghalangi pertumbuhan penduduk lokal sudah ada. Pada tahun 1882, Belanda membentuk *pristerrraden* yang mendapat tugas mengawasi pengajaran agama di pesantren- pesantren.

Bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan sambil berdagang juga menyebarkan agamanya. Konteks penyebaran agama itu menjadi permulaan kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Sekolah-sekolah didirikan di pulau Ambon dan pulau Bacan, Maluku. Sekolah-sekolah ini belum mengajarkan pengetahuan umum. Bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Melayu, baru pada kelas-kelas yang lebih tinggi dipakai bahasa Belanda. Pihak Belanda juga mendirikan sekolah- sekolah bagi calon pegawai VOC.

Pendidikan Untuk Bumiputera, Dalam rangka memperbaiki pengajaran rendah bagi Bumiputera, maka pada tahun 1907 diambillah beberapa tindakan penting, yaitu:

- a. Memberi corak dan sifat ke Belanda-Belandaan pada sekolah kelas I.
- b. Mendirikan sekolah-sekolah Desa.
- c. Mendirikan sekolah-sekolah *Vervolg* (Sekolah Sambungan).
- d. Mendirikan sekolah Bumiputera kelas II.
- e. Membuat sekolah dasar berbahasa Belanda untuk Cina dan Bumiputera.
- f. Memberikan pendidikan rendah (*Lager Onderwijs*).
- g. Memberikan pendidikan lanjutan/MULO (*Meer Uitragebreid Lager Onderwijs*).
- h. Mendirikan sekolah menengah Umum (*Algemeene Middlebares School*).
- i. Mendirikan sekolah warga negara tinggi (*Hooger Burger School*).

3. Pendidikan Guru

Selain sekolah lanjutan, Belanda juga, mendirikan sekolah pendidikan guru. Adapun jenis-jenis sekolah pendidikan guru yang ada sebagai berikut:

- a. Untuk Sekolah Desa
 - b. Untuk Sekolah *Vervolg* (Sekolah Kelas II)
 - c. Untuk HIS (*Hollands Inlandse School*)
- ### 4. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan meliputi:

- a. Sekolah pertukangan (*Ambacht Leergang*)
 - b. Sekolah teknik (*Technish Onderwijs*)
 - c. Pendidikan dagang (*Handels Onderwijs*)
 - d. Pendidikan pertanian (*Landbauw Onderwijs*)
 - e. Pendidikan kejuruan kewanitaan (*Meisjes Vokonderwijs*).
5. Pendidikan Sekolah-Sekolah Tinggi

Sekolah-sekolah tinggi di Indonesia pada tahun 1920 dianggap belum matang untuk mendirikan sekolah tersebut. Sebelum adanya AMS yang didirikan pada tahun 1919, hanya ada HBS 5 tahun yang memberikan pengajaran menengah. Inipun hanya terbatas dan hanya sedikit mengeluarkan murid-muridnya terutama terdiri dari anak-anak Belanda. Jadi, pada masa itu tidak ada sekolah menengah lainnya bagi bangsa Indonesia. Namun, karena terdesak akan tenaga-tenaga insinyur, maka akhirnya didirikanlah:

- a. Pendidikan keguruan (Kweekschool), meliputi 3 bidang keahlian yaitu sekolah tabib tinggi / pendidikan tinggi kedokteran, pendidikan tinggi hukum, dan pendidikan tinggi teknik.
 - b. Sekolah schakel.
 - c. Inheemse mulo (Mulo Bumiputera).
6. Pendidikan di Indonesia pada Zaman Penjajahan Jepang

Setelah Belanda ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, maka Belanda mengangkat kaki mereka dari Indonesia. Semenjak itulah mulai penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang muncul sebagai negara terkuat di Asia. Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia, semuanya diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada perang pasifik. Tidak mengherankan bahwa segala komponen sistem pendidikannya ditujukan untuk kepentingan perang. Karakteristik pendidikan Jepang adalah sebagai berikut: a) Dihapuskannya sistem "Dualisme Pendidikan", b) Berubahnya tujuan pendidikan, c) Proses pembelajaran diganti dengan kegiatannya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, d) Tenaga pendidik dilatih agar mempunyai semangat perang, e) Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang sangat memprihatinkan, f) Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, g) Pendidikan Guru.

Ada 3 macam sekolah guru di zaman Jepang, yaitu:

- 1) Sekolah guru 2 tahun (*Syoto Sihan Gakko*)
- 2) Sekolah guru menengah 4 tahun (*Guto Sihan Gakko*)
- 3) Sekolah guru tinggi 6 tahun (*Koto Sihan Gakko*).

Pelajaran-pelajaran yang diberikan antara lain meliputi Sejarah Ilmu Bumi, Bahasa Indonesia (Melayu), Adat Istiadat, Bahasa Jepang, Ideologi Jepang, dan Kebudayaan Jepang.

a. Pendidikan Islam

Dengan adanya penyederhanaan sistem pendidikan dan sekolah zaman pendudukan Jepang, memberikan kesempatan belajar terbuka lebar bagi semua golongan penduduk di Indonesia. Semua mendapatkan kesempatan yang sama, jalur-jalur sekolah, dan pendidikan menurut penggolongan keturunan bangsa, strata, ataupun strata sosial telah dihapuskan. Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil kebijakan:

- 1) Mengubah Kantor Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang dipimpin orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin oleh tokoh Islam sendiri, yakni K.H. Hasyim Asy'ari.
- 2) Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang.
- 3) Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin.
- 4) Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta.
- 5) Diizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA), yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan.
- 6) Diizinkan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menyertakan 2 ormas besar Islam, yaitu Muhammadiyah dan NU.

Pendidikan Indonesia pada Masa Kemerdekaan sampai Orde Lama

Pendidikan Masa Kemerdekaan, Kebijakan pendidikan di masa kemerdekaan, yaitu 1945-1950. Pada masa itu bangsa Indonesia disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan dan memadamkan pergolakan di beberapa wilayah akibat politik adu domba Belanda. Tentunya, bisa kita bayangkan betapa sulitnya mengelola pendidikan nasional pada masa itu. Terlepas dari itu, mengenai pendidikan di Indonesia dalam kurun waktu antara 17 Agustus 1945 hingga 17 Agustus 1950, secara *de jure* (hukum) wilayahnya meliputi seluruh wilayah bekas Hindia-Belanda, tetapi secara *de facto* (kenyataan), daerah yang secara nyata dikuasai pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan adanya Perjanjian Linggarjati (November 1946), Perjanjian Renville (Januari 1948), dan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (November 1949).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka.

Pancasila sebagai dasar dan filsafah negara Indonesia, seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijadikan landasan utama

pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam kurun waktu 1945-1950 negara kita mengalami beberapa kali perubahan undang-undang dasar, dasar falsafah negara tidak mengalami perubahan. Oleh karena itulah, Pancasila menjadi landasan utama pendidikan di Indonesia (Gunawan, 1995:31-32).

Pada masa itu juga menghasilkan kurikulum nasional. Adapun susunan kurikulum sekolah yang berlaku sejak tahun 1945-1950 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Rendah rendah adalah sekolah dasar yang sejak awal kemerdekaan disebut sebagai sekolah Rakyat. Lam pendidikannya yang semula tiga tahun menjadi enam tahun.
- 2) Pendidikan Guru, Dalam periode 1945-1950, kita mengenal tiga jenis pendidikan guru, yaitu Sekolah Guru B (SGB), Sekolah Guru C (SGC), dan Sekolah Guru A (SGA).
- 3) Pendidikan Umum, da dua jenis pendidikan. Yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT).
- 4) Pendidikan Kejuruan, Pendidikan kejuruan disini adalah pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan.
- 5) Pendidikan Teknik, Seperti halnya sekolah lain, keadaan sekolah teknik tidaklah teraur karena, disamping pelajarnya sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah tersebut kadang dipakai juga sebagai pabrik senjata. Sekolah teknik di Solo, misalnya, dikerahkan untuk membuat senjata yang sangat diperlukan kendaliapa adanya. Sedangkan, sekolah-sekolah teknik yang ada pada masa itu ialah Kursus Kerajinan Negeri (KKN), Sekolah Teknik Pertama (STP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Teknik Menengah (STM), dan Pendidikan Guru unuk Sekolah-Sekolah Teknik (PGST).
- 6) Pendidikan Tinggi, Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi kendati mengalami berbagai tantangan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan merupakan salah satu kekuatan sekolah rakyat.

Pendidikan Masa Orde Lama, Kondisi pendidikan di zaman Orde Lama, difokuskan antara 1950-1966. Seperti diketahui, sesudah Konferensi Meja Bundar pada 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Di dalam RIS diatur mengenai Pendidikan dan Pengajaran. Di dalam UUD RIS juga diatur mengenai pendidikan nasional.

Kota juga memiliki langsung kebijakan pendidikan nasional di era ini mulai dari Pasal 30 UUDS 1950, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- 2) Memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas.
- 3) Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasayang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang.

Salah satu hal yang menentukan Orde Lama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pendidikannya adalah terciptanya atau terwujudnya Undang-Undang No.4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dan usaha pendidikan nasional pemerintahan Orde Lama pada awalnya adalah untuk menghilangkan buta huruf.

Pendidikan di Indonesia pada Masa Orde Baru sampai Masa Reformasi

Pendidikan Masa Orde Baru, Pada bab ini akan dibahas mengenai pendidikan nasional di zaman Orde Baru dengan kepada pemerintahannya Soeharto. Pada masa Orde Baru ini rezim dapat bertahan lebih lama dan stabil jika dibandingkan dengan rezim Orde Lama maupun rezim-rezim reformasi saat ini. Apa saja yang bisa dilakukan oleh rezim ini bagi kemajuan pendidikan nasional, capaian-capaiannya maupun prestasinya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Juga akan diberikan sebuah penilaian secara kritis mengenai kebijakan pendidikan nasional pada zaman pemerintahan Soeharto ini.

Hal tersebut kemudian dikuatkan dalam pasal 4 Ketetapan MPRS nomor XXIIMPRS/1966 tersebut, selanjutnya disebutkan tentang isi pendidikan harus memuat:

- 1) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama.
- 2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
- 3) Membina/mengembangkan fisik yang kuat dan sehat (Gunawan, 1995:51).

Ketetapan MPRS diatas menjadi penanda berubahnya pendidikan nasional dari Orde Lama menuju Orde Baru. Itu sangat kentara. Setidaknya, terdapat dua hal, yaitu pembentukan manusia pancasilais sejati yang jelas dikaitkan oleh peristiwa tragis pasca-Gerakan 30 September atau 1 Oktober, ketika Orde Baru menuduh PKI sebagai penghianat Pancasila karena ingin mengubah dasar Negara Pancasila menjadi Komunis. Kemudian, yang kedua adalah mengubah mental masyarakat yang penuh doktrin-doktrin Manipol USDEK, yang merupakan kebijakan Soekarno. Jadi, Orde Baru mencoba mengidentifikasi dirinya dalam hal ini bidang pendidikan.

Pada 28-30 April 1969, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar/pemikir pendidikan di Cipayung untuk mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional yang tengah terjadi saat itu. Di dalam pertemuan tersebut, para pakar mengambil kesimpulan bahwa perkembangan pendidikan ditentukan oleh faktor-faktor luar, seperti politik, ekonomi, social budaya, serta faktor-faktor intern. Kedua faktor tersebut harus diidentifikasi secara cermat, baru kemudian disusun suatu strategi serta program penanggulangnya.

Diadakannya Konferensi Cipayung tersebut memiliki tiga tujuan. Pertama, mengidentifikasi semua persoalan dibidang pendidikan. Kedua, menyusun suatu

prioritas dari berbagai persoalan tersebut untuk dipecahkan atau diperhatikan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Ketiga, mencari alternative pemecahan (Tilaar, 1995: 113-114).

Hasil identifikasi masalah-masalah pendidikan dari konferensi Cipayung menggolongkan masalah tersebut dalam enam kategori sebagai berikut:

- a. Pendidikan luar sekolah
- b. Kurikulum sekolah dasar
- c. Kurikulum sekolah menengah
- d. Kurikulum pendidikan tinggi
- e. Pembiayaan pendidikan
- f. Sarana pendidikan

Salah satu hasil Konferensi Cipayung yang terkenal itu ialah lahirnya Proyek Penilaian Nasional Pendidikan pada 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud Tanggal 26 Mei 1969 Nomor 033/1969. Isi SK tersebut ialah dalam jangka waktu dua tahun (kemudian diubah menjadi tiga tahun) PPNP harus sudah berhasil menyusun strategi pendidikan nasional.

Melalui Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) diharapkan hasilnya akan dimanfaatkan oleh Badan Pengembangan Pendidikan (BPP) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang didirikan melalui Keputusan Presiden No. 84/1969 tanggal 18 Oktober 1969. Menurut catatan, badan pengembangan ini merupakan institusi pertama didirikan dalam lingkungan pemerintahan yang kemudian diikuti oleh badan-badan sejenis departemen-departemen.

Tugas dari badan Pengembangan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan.
 - 2) Mengadakan eksperimen-eksperimen dan proyek-proyek perintis dalam rangka pengembangan pendidikan.
2. Pendidikan Masa Orde Reformasi

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana kebijakan di zaman reformasi sampai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono jilid ke dua ini. Penulis memulai pembahasan tentang deskripsi pendidikan nasional di zaman reformasi ini dengan mengambil kutipan dari tulisan seorang aktivis pendidikan sekaligus ruhaniawan, Romo J.J. Drost yang menyindir belum ada perbedaan yang signifikan pendidikan di zamna colonial sampai saat ini (Drost, 1998:26), dikatakannya, "Di zaman penjajahan, zaman sebelum Perang Dunia II, jelas sekali perbedaan system persekolahan bagi kaum eropa dan bagi sejumlah kecil bangsa Indonesia dan bagi rakyat Indonesia yang biasa. Bagi golongan pertama *eurepese lagere school* enam atau Tujuh, kemudian HBS lima tahun atau *lyceum* enam tahun. Jadi, hanya dua kotak.

Bagi anak Indonesia, ditambah satu kotak lagi: HIS, MULO, dan AMS. Sementara itu, bagi rakyat kecil yang berkesempatan bersekolah terdapat lima kotak: sekolah angka loro, schakelschool.

Menurut ketentuan pasal 11 UU No. 22 tahun 1999, pendidikan termasuk salah satu bidang yang oleh pemerintah didesentralisasikan. Dengan demikian, masalah pendidikan yang semula serba ditandatangani pemerintah pusat, tanggung jawab masalah ini bergeser ke pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah daerah kabupaten maupun kota.

Didalam program pembangunan nasional (Propenas) 1999-2004, juga diakui bahwa manajemen pendidikan nasional selama ini secara holistic sangat sentralistis sehingga menutup dinamika demokratisasi pendidikan. Diakui maupun tidak, manajemen pendidikan yang sentralistis akan menyebabkan dan melahirkan kebijakan seragam yang tidak mampu dan tidak dapat mewedahi segala perbedaan, keberbedaan, atau heterogenitas kepentingan setiap daerah, sekolah, dan peserta didik. Ini kemudian mematkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan.

Sejarah Pendidikan Luar Sekolah di Indonesia

Dasar Pemikiran Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan luar sekolah sudah hadir di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan, dalam arti bahwa pendidikan luar sekolah telah hidup dan menyatu di dalam kehidupan setiap masyarakat jauh sebelum muncul dan dan memasyarakatnya sistem persekolahan. Hanya saja pengakuan Yuridis baru didapatkan pada tahun 1989, yaitu setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam Undang-Undang ini terkandung memberi pelayanan pendidikan sepanjang hayat bagi seluruh warga masyarakat tanpa membedakan usia, kelamin, suku, agama, budaya, dan lingkungan.

Pendidikan luar sekolah dalam Peraturan Pemerintah No. 73/1991 bertujuan untuk melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu pendidikannya memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Dari kaca mata sejarah, alasan diselenggarakannya Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yaitu:

1. Aspek Pelestarian Budaya

Pendidikan yang pertama terjadi dan berlangsung adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Sehingga pendidikan luar sekolah pada permulaan kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung di dalam keluarga. Bentuk kegiatan yang berlangsung di lingkungan keluarga dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun-temurun yang meliputi kemampuan, cara kerja, dan teknologi yang dimiliki oleh

masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Walaupun sistem pendidikan yang berlaku di dalam keluarga berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah, namun kegiatan belajar inilah yang mendasari lahirnya pendidikan luar sekolah.

2. Aspek Teoritis

Mengacu kepada teori yang diketengahkan Philip H. Coombs (1973:10), tidak satupun lembaga pendidikan formal, informal, maupun nonformal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Atas dasar teori tersebut, dapat dikatakan bahwa keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, tetapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat dalam upaya pemerataan kesempatan belajar, meningkatkan kualitas hasil belajar, dan mencapai tujuan pembelajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Dasar Pijakan

Ada 3 dasar pijakan bagi PLS sehingga memperoleh legitimasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu UUD 1945, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Berdasarkan dasar pijakan tersebut, dapat dikemukakan bahwa PLS adalah kumpulan individu yang menghimpun dari dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar.

4. Aspek Kebutuhan Terhadap Pendidikan

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meluas, tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan juga pada masyarakat yang berada di daerah perdesaan. Kesadaran ini didasari oleh perkembangan ekonomi, IPTEK, politik, sadar akan kebodohan, dan lain sebagainya sehingga dibentuklah bentuk-bentuk kegiatan kependidikan baik yang bersifat sekolah maupun luar sekolah.

5. Keterbatasan Lembaga Pendidikan Sekolah

Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku serta berbagai keterbatasan lainnya. Akibat dari kekurangan maupun keterbatasan tersebut memungkinkan suatu kegiatan kependidikan yang bersifat informal atau nonformal diselenggarakan, dengan harapan pendidikan masyarakat tersebut dapat terpenuhi.

Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan salah satu jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal yang bukan pendidikan formal dan informal. Pendidikan luar sekolah ada sebagai penunjang pendidikan formal yang sudah terselenggara yang dirasa belum mampu secara maksimal menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan ril dunia kerja dan kehidupan sosial masyarakat selama ini.

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwa pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Sementara di ayat (3), disebutkan bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pada ayat (4), menjelaskan bahwa pelaksanaan satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pendidikan luar sekolah mempunyai peranan untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam upaya pemecahan masalah tentang pendidikan. Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan sebagai pelengkap pendidikan sekolah, PLS dapat menyajikan beberapa mata pelajaran atau kegiatan belajar yang belum termuat dalam kurikulum pendidikan sekolah, sedangkan materi pembelajaran atau kegiatan tersebut sangat dibutuhkan oleh peserta didik dan masyarakat yang menjadi layanan sekolah. Sebagai penambah pendidikan sekolah, PLS dapat memberikan kesempatan tambahan pengalaman belajar dalam mata pelajaran yang sama yang ditempuh sekolah kepada mereka yang masih bersekolah atau mereka yang telah menamatkan jenjang pendidikan sekolah. Sebagai pengganti pendidikan sekolah, PLS dapat menggantikan fungsi sekolah di daerah-daerah yang karena berbagai alasan, penduduknya belum terjangkau oleh pendidikan sekolah.

SIMPULAN

Sejarah pendidikan di Indonesia memiliki cerita yang menarik dari masa ke masanya. Sejarah pendidikan di Indonesia di masa lampau hingga sekarang memberikan kita gambaran bahwa dalam bentuk apapun, pendidikan itu tetaplah penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda-beda, tetapi pendidikan tetap memiliki tujuan yang sama. Mulai dari pendidikan keagamaan, pendidikan karena penajahan, hingga pendidikan pasca

kemerdekaan. Setiap masa wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa itu dan mampu menjawab tantangan di masa akan datang.

Pendidikan luar sekolah memiliki bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah timbul dari konsep pendidikan seumur hidup, dimana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan atau pendidikan formal saja. Pendidikan luar sekolah pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Pembinaan dan pengembangan PLS dipandang relevan untuk bisa saling mengisi atau topang-menopang dengan sistem persekolahan. Agar setiap lulusan bisa hidup mengikuti perkembangan zaman dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan IPTEK yang semakin maju.

REFERENSI

- Syahrudin, Heri Susanto. (2019). *SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA: Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.
- Muhammad Rifa'i. (2017). *SEJARAH PENDIDIKAN NASIONAL: Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- <http://formadiksi.um.ac.id/sejarah-pendidikan-indonesia-dari-masa-ke-masa-membentuk-karakter-pribadi-pribumi-bangsa/>
- Renna E., Yatim Riyanto. (2020). *JURNAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH: Manajemen dalam Akreditasi di Satuan Pendidikan Non Formal SKB Kota Malang*. Universitas Negeri Surabaya.
- Syarbaini Saleh, dkk. (2020). *Pendidikan Luar Sekolah*. Medan: K-Media Irjus
- Indrawan, dkk. (2020). *Pendidikan Luar Sekolah*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.